

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal SNA VI:1140-1159. Surabaya.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aprilla, Nila dan Redo Arian Saputra. 2013. *Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, 3(2):107-132. Universitas Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Devita, Andri, Arman Delis, dan Junaidi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2(2): 63-70. Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C. dan Willian H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3:305-360. North-Holland Publishing Company.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purpitasari, Puput. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 4(11):1-16. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Putra, Ida Bagus Dwi dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. *Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, 13(3):811-827. Universitas Udayana.
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rusli, Said. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.
- Salindeho, Claudia. 2016. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA), 4(3):705-716. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sari, Rosy Puspita dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung*. E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 3(10):452-459. Universitas Udayana.
- Sasana, Hadi. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 18(1):46-58. Universitas Diponegoro Semarang.
- Segoro, Waseso dan Mega Pratiwi. 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*. Jurnal Simposium Nasional. Universitas Gunadarma.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: CAPS.
- Ulum, Ihyaul. 2005. *Analisis atas Dana Perimbangan dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia*. Jurnal Humanity, 1(1):23-28. Universitas Muhammadiyah Malang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sumber Internet:

<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3287809/pusat-tunda-cairkan-dau-kabupaten-ini-siapkan-strategi-pembiayaan>(Diakses pada tanggal 3 Maret 2017)

<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3427641/daerah-otonom-paling-banyak-habiskan-apbd-buat-gaji-pns>(Diakses pada tanggal 3 Maret 2017)

<http://finance.detik.com/moneter/3129195/ini-daftar-provinsi-dengan-dana-menganggur-terbesar-di-2015>Diakses pada tanggal 4 Maret 2017)

<http://manadopostonline.com/read/2017/03/06/Ada-Ratusan-Miliar-DAK-Belum-Terbayar/20856/3>(Diakses pada tanggal 6 Maret 2017)

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151216120324-78-98572/serapan-apbd-di-bawah-90-jatah-dak-kuartal-iv-dibekukan/>(Diakses pada tanggal 6 Maret 2017)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/16/of4si1361-kaltim-minta-pusat-lunasi-utang-dana-bagi-hasil>(Diakses pada tanggal 6 Maret 2017)

<https://ekbis.sindonews.com/read/1175852/33/kemenkeu-minta-pemda-perbaiki-kualitas-belanja-apbd-1485864997>(Diakses pada tanggal 3 Maret 2017)

<https://m.tempo.co/read/news/2017/03/05/090852745/pemerintah-perangi-kemiskinan-lewat-dana-transfer>(Diakses pada tanggal 8 Maret 2017)

<https://www.bps.go.id/subjek/view/id/12>(Diakses pada tanggal 8 Maret 2017)